

Bagaimana cara Menyusun Kebijakan Etika Bisnis dalam Perusahaan

WAHYU HINDARTO
222040100027@umsida.ac.id

Pendahuluan

Artikel ini menggunakan 4 sumber referensi dalam penyusunan artikel ini. Referensi pertama yang digunakan adalah Buku ajar hukum perusahaan yang ditulis oleh Mochammad Tanzil multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih Pada Maret tahun 2023 yang diterbitkan oleh Umsida press. Buku ini membahas terkait karakteristik Perusahaan baik non hukum maupun yang berbadan hukum. Kemudian terdapat pembahasan lain mengenai karakteristik asosiasi orang, asosiasi modal, penggunaan istilah perusahaan, pendirian perusahaan, organisasi perusahaan, permodalan dalam perusahaan, penentuan kebijakan perusahaan, kewajiban pada perusahaan, tindak pidana perusahaan dan terdapat banyak bab lainnya yang dibahas, dalam buku ini terdapat 11 bab. Buku ini memiliki banyak kelebihan karena buku ini di bahas dengan detail, lengkap disertai gambar penunjang yang dapat menarik minat pembaca. Buku ini disusun per bab dan sub bab pembahasan yang ditata rapi dengan susunan yang elegan dan pemberian warna yang pas di setiap halaman buku. Disetiap bab diberi soal berupa pilihan ganda, soal cerita maupun essay sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa maupun pembaca terkait penjelasan materi yang dipaparkan sebelumnya [1]. Referensi kedua berjudul *Good corporate governance* dalam perspektif etika bisnis ditulis oleh Wulandari dan Siswi dalam *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*. Jurnal ini memiliki kelebihan dengan menekankan penerapan teori dan konsep bisnis dan ekonomi dalam situasi nyata. Ini membantu pembaca untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks bisnis sehari-hari.

Referensi ketiga ditulis oleh Nabila fara Nada Judul: "Etika Bisnis untuk Keberlanjutan Perusahaan" oleh Nabila Farah Nada. Artikel ini membahas pentingnya etika bisnis sebagai fondasi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Pembahasan meliputi pengertian etika bisnis, prinsip-prinsipnya, tanggung jawab sosial, pertanyaan umum, contoh pelanggaran, dan dampaknya. Ditambah dengan analisis kasus Volkswagen sebagai ilustrasi. Kelebihan: Artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya etika bisnis dalam konteks keberlanjutan perusahaan. Menyediakan prinsip-prinsip yang jelas dan relevan serta mengilustrasikan dengan studi kasus aktual untuk memperkuat pembahasan. Referensi ke empat dengan jurnal berjudul "Faktor Kebijakan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia dan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan karyawan pada PT. SKM." Jurnal ini ditulis oleh Achmad Fauzi dan Marni Manao, diterbitkan pada tahun 2023 dalam Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis. Isinya membahas faktor-faktor kebijakan kedisiplinan SDM, CSR, pemberdayaan SDM, dan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan karyawan di PT. SKM. Kelebihannya adalah memberikan wawasan tentang hubungan antara kebijakan SDM, CSR, dan kesejahteraan karyawan dalam konteks perusahaan tertentu.

Maka dari penjabaran referensi diatas, penulis hendak menulis artikel terkait bagaimana cara menyusun kebijakan etika bisnis dalam perusahaan yang terdiri dari beberapa tahapan yakni mengidentifikasi 13 aspek sebagai penilaian kebijakan, kemudian tahapan kedua langkah penting dalam menyusun kebijakan etika bisnis dalam perusahaan dan tahap terakhir membahas terkait pendekatan sistematis dan terencana dalam menyusun kebijakan etika bisnis dalam perusahaan

Tahapan 1

Dalam menyusun kebijakan etika bisnis dalam perusahaan harus mencakup 13 aspek sebagai penilaian kebijakan etika bisnis:

1. **Komitmen:** Komitmen perusahaan untuk mematuhi standar etika yang tinggi dalam semua aspek operasionalnya. Ini mencakup kesediaan untuk mengutamakan kepentingan stakeholder, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta mempromosikan kebaikan umum.
2. **Transparansi:** Keterbukaan dan kejelasan dalam semua kegiatan dan komunikasi perusahaan. Transparansi mencakup memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan pihak luar.
3. **Akuntabilitas:** Tanggung jawab individu dan organisasi atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup mengakui kesalahan, mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah, dan menerima konsekuensi dari perilaku yang tidak etis.
4. **Responsibilitas:** Kewajiban perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi di mana ia beroperasi. Ini termasuk mengelola dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
5. **Independensi:** Kemampuan untuk mengambil keputusan yang bebas dari pengaruh yang tidak sehat atau konflik kepentingan. Ini memastikan bahwa keputusan bisnis diambil berdasarkan pertimbangan objektif dan kepentingan jangka panjang perusahaan.
6. **Keadilan:** Memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya. Ini juga mencakup distribusi sumber daya dan kesempatan yang merata di seluruh organisasi.
7. **Kompetensi:** Memiliki karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Ini mencakup investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.
8. **Kepemimpinan:** Memiliki pemimpin yang memberikan contoh yang baik dalam mempraktikkan nilai-nilai etika dan menginspirasi karyawan untuk mengikuti jejak mereka. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam mempromosikan budaya etika yang kuat dalam organisasi.
9. **Kemampuan Bekerja Sama:** Memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan individu dan organisasi lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup kolaborasi antardepartemen, mitra bisnis, dan pihak luar lainnya.
10. **Visi Misi & Tata Nilai:** Memiliki visi dan misi yang jelas serta nilai-nilai inti yang membimbing perilaku dan keputusan perusahaan. Visi dan misi yang kuat memberikan arah yang jelas bagi organisasi, sementara nilai-nilai membentuk budaya perusahaan.
11. **Strategi Kebijakan:** Menetapkan strategi yang terarah dan terukur dalam menerapkan kebijakan etika bisnis. Ini mencakup pengembangan rencana aksi yang konkret dan langkah-langkah untuk memastikan kebijakan diterapkan secara efektif di seluruh organisasi.
12. **Etika:** Mempromosikan prinsip-prinsip etika yang tinggi dalam semua aspek operasi dan keputusan perusahaan. Ini mencakup integritas, jujur, kejujuran, dan konsistensi dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut.
13. **Iklim Etikal:** Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung praktik bisnis yang etis dan mempromosikan perilaku yang positif. Ini mencakup membangun budaya perusahaan yang memuliakan etika dan memberikan penghargaan kepada individu yang menunjukkan perilaku etis [2].

Dengan memperhatikan setiap aspek ini, perusahaan dapat menyusun kebijakan etika bisnis yang komprehensif dan efektif.

Tahapan 2

Menyusun kebijakan etika bisnis dalam perusahaan melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika bisnis yang dipegang oleh perusahaan diterapkan secara konsisten dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti:

1. Awali dengan memahami definisi etika bisnis dan bagaimana nilai-nilai etika bisnis dapat diterapkan dalam operasional bisnis. Etika bisnis adalah kumpulan nilai dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan bisnis, serta menjadi panduan dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasional bisnis.
2. Identifikasi nilai-nilai etika bisnis yang ingin diterapkan oleh perusahaan. Nilai-nilai ini dapat meliputi integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Integritas melibatkan menjalankan bisnis dengan jujur dan menghormati nilai-nilai moral.
3. Buatlah Pedoman dan Kode Etik Perusahaan yang menjadi landasan hukum dan acuan. Pedoman dan Kode Etik ini harus diterapkan oleh setiap individu di perusahaan tanpa kecuali. Setiap individu di perusahaan bertanggung jawab untuk mengetahui, memahami, menyelaraskan, dan menerapkan prinsip-prinsip Pedoman dan Kode Etik Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaannya dan mewakili perusahaan untuk pihak-pihak eksternal.
4. Komunikasikan dan sosialisasikan Pedoman dan Kode Etik Perusahaan kepada semua karyawan dan pihak yang terkait dengan perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mengikuti nilai-nilai etika bisnis yang dipegang oleh perusahaan.
5. Pastikan bahwa Pedoman dan Kode Etik Perusahaan diterapkan secara konsisten dan efektif melalui pengawasan dan evaluasi. Perusahaan harus menetapkan pihak-pihak tertentu untuk bertanggung jawab melakukan pengawasan dan evaluasi agar Pedoman dan Kode Etik Perusahaan berjalan dengan baik.
6. Berkelanjutan pengembangan dan perbaikan Pedoman dan Kode Etik Perusahaan untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika bisnis perusahaan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan bisnis dan lingkungan [3].

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan bahwa kebijakan etika bisnisnya diterapkan secara konsisten dan efektif, serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan melalui perilaku bisnis yang etis dan transparan.

Tahapan 3

Berikutnya terdapat pendekatan yang sistematis dan terencana dalam Menyusun kebijakan etika bisnis dalam sebuah perusahaan memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti:

1. Penetapan Tim Kerja khusus yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan etika bisnis. Tim ini harus terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen dan tingkatan dalam perusahaan.
2. Lakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan perusahaan terkait dengan kebijakan etika bisnis. Tinjau nilai-nilai perusahaan, tujuan bisnis, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.
3. Kenali pihak-pihak yang terlibat atau dipengaruhi oleh kebijakan etika bisnis, seperti karyawan, manajemen, pelanggan, dan pihak luar lainnya. Pertimbangkan kebutuhan dan harapan dari setiap pemangku kepentingan ini.
4. Tentukan standar etika yang ingin diterapkan dalam perusahaan. Standar ini harus mencakup prinsip-prinsip dasar yang akan membimbing perilaku dan keputusan di semua tingkatan organisasi.
5. Susunlah kebijakan etika bisnis dengan memperhatikan setiap aspek yang diperlukan, seperti komitmen, transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain. Pastikan kebijakan ini diartikulasikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

6. Libatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan kebijakan, termasuk manajemen senior, departemen fungsional, dan perwakilan karyawan. Dapatkan masukan dan umpan balik dari mereka untuk memastikan bahwa kebijakan mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan organisasi secara menyeluruh.
7. Tetapkan prosedur yang jelas untuk mengimplementasikan kebijakan etika bisnis dalam operasi sehari-hari perusahaan. Ini termasuk pembentukan tim atau komite etika, pelatihan karyawan, pemantauan, dan pelaporan.
8. Komunikasikan kebijakan etika bisnis kepada seluruh anggota organisasi secara jelas dan transparan. Berikan pelatihan kepada karyawan tentang prinsip-prinsip dan prosedur yang terkandung dalam kebijakan.
9. Tetapkan jadwal untuk mengevaluasi dan merevisi kebijakan etika bisnis secara berkala. Tinjau keefektifan kebijakan, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan sesuaikan kebijakan sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
10. Tetapkan sanksi bagi pelanggar kebijakan etika bisnis dan pastikan penegakan secara konsisten [4].

Simpulan

Kesimpulannya, menyusun kebijakan etika bisnis dalam sebuah perusahaan merupakan proses yang penting dan kompleks. Langkah-langkahnya melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etika bisnis, identifikasi standar etika yang ingin diterapkan, serta komunikasi dan implementasi kebijakan secara efektif kepada seluruh anggota organisasi. Proses ini juga membutuhkan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan dan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dengan menerapkan kebijakan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang etis dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Edisi Pert. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023. doi: <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>.
- [2] S. Wulandari, "Good Corporate Governance dalam Perspektif Etika Bisnis," *JABE (Journal Appl. Bus. Econ.)*, vol. 1, no. 3, pp. 184–199, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v1i3.1401>.
- [3] N. F. Nada, "Prinsip Etika Bisnis untuk Keberlanjutan Perusahaan," Telkom University. [Online]. Available: <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/pengertian-prinsip-dan-contoh-etika-bisnis>
- [4] A. Fauzi and M. Manao, "Faktor Kebijakan Kedisiplinan Sumber Daya Manusia, Corporate Social Responsibility 'CSR', Peningkatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada PT. SKM," *JAMAN (Jurnal Akutansi dan Manaj. Bisnis)*, vol. 3, no. 2, pp. 67–80, 2023, [Online]. Available: <http://journal.admi.or.id/index.php/JAMAN/article/view/740>